

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu

harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yuliani et al, 2010). Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi,

perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan sistem pengendalian internal yang efektif.

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada didalamnya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam organisasi publik, peran Sumber Daya Manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan Pasal 3 PP No.101 Tahun 2000 bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik

pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Sistem pengendalian intern dibutuhkan untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu (Mirnayanti, 2013). Permendagri No. 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internalnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam Standar Auditing Seksi 319 paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan dengan

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya di manfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Arfianti, 2011). Menurut Widjajanto (2001:89 dalam Sembiring, 2013) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rata-rata berdasarkan penilaian BPK kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sudah cukup baik dengan ditunjukkan oleh data bahwa sebagian besar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun ada beberapa pemerintah daerah yang menemukan kendala dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kondisi tersebut yang memotivasi saya untuk melakukan penelitian ini dan perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu Kabupaten/Kota Boyolali. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul:

**“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD Kabupaten Boyolali)”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk menguji apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi sebagai literature maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## **E. Sistematika Penulisan**

### I. PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Serta pemikiran terdahulu, kerangka pemikiran dan teknik analisis data

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional/variabel dan pengukuranya, juga model analisis data.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengelolaan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan pembahasan atas hasil analisis data.

#### V. PENUTUP

Penutup terdiri atas simpulan, saran dan keterbatasan penulisan mengenai penelitian yang telah dilakukan.